

**PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (*LIFESKILLS*)
SEBAGAI STRATEGI INTERVENSI
DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN SOSIAL DI INDONESIA**

¹Ani Retno Dumilah, ²Ety Rahayu

Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

ani_gemini01@yahoo.com etryahayu9@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk melihat gambaran program pendidikan kecakapan hidup (*Life Skills*) berbasis vokasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk intervensi makro dalam perspektif pembangunan sosial di Indonesia. Studi yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan teknis analisis data deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran program secara mendetail. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal hasil evaluasi program di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan juga Badan Pusat Statistik, digabungkan dengan data implementasi program. Hasil dari studi ini adalah program ini merupakan kebijakan (produk sosial) yang disusun sebagai strategi intervensi pemerintah dengan pelibatan masyarakat sebagai agen perubahan dari kalangan akademisi dan praktisi. Program Pendidikan Kecakapan Hidup berbasis vokasi yang diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha telah menggambarkan sebuah program pembangunan sosial. Pengimplementasiannya berorientasi pada pemberdayaan peserta dan terfokus pada peningkatan kompetensi berupa pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*). Program telah diimplementasikan mengarah pada pembangunan sosial dan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari 5 jenis keterampilan yang paling banyak diminati para peserta program, yakni jenis otomotif dan layanan jasa, komputer dan desain grafis, menjahit, tata rias dan seni kreatif. Kelima jenis keterampilan tersebut merupakan jenis keterampilan yang mampu membekali peserta dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dan juga dunia wirausaha yang saat ini sedang berkembang, hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Strategi Intervensi, Pembangunan Sosial

**LIFE SKILLS EDUCATION PROGRAM AS AN INTERVENTION STRATEGY
IN THE PERSPECTIVE OF SOCIAL DEVELOPMENT IN INDONESIA**

Ani Retno Dumilah, Ety Rahayu
Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
email: ani_gemini01@yahoo.com, etyrahayu9@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to see an overview of vocational-based Life Skills education programs at the Ministry of Education and Culture as a form of macro intervention in the perspective of social development in Indonesia. The study is a literature study with qualitative descriptive data analysis techniques to get a detailed description of the program. The data used are secondary data derived from the results of program evaluations at the Directorate of Training and Training and the Central Statistics Agency, combined with program implementation data. The result of this study is that this program is a policy (social product) that has been prepared as a government intervention strategy with community involvement as an agent of change from academics and practitioners. Vocational-based Life Skills Education programs organized in the form of work skills education and entrepreneurship skills education programs have described a social development program. Its implementation is oriented towards the empowerment of participants and is focused on increasing competencies in the form of knowledge, skills and attitudes. The program has been implemented leading to social and economic development. This can be seen from the five types of skills that are most sought after by program participants, namely the types of automotive and services, computer and graphic design, sewing, cosmetology and creative arts. The five types of skills are types of skills that are able to equip participants with competencies in accordance with the needs of the business world and the industrial world and also the entrepreneurial world that is currently developing, it can indirectly improve social welfare.

Keywords: Life Skills Education Program, Intervention Strategies, Social Development

PENDAHULUAN

Pembangunan sosial merupakan amanat yang tercantum dalam UUD 1945, yang didalamnya tercantum bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembangunan dilakukan di berbagai tingkat baik level lokal, nasional maupun global. Pembangunan mencakup upaya peningkatan semua aspek kehidupan seperti pembangunan fisik, sosial, budaya ekonomi, pertahanan keamanan dan juga ideologi. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pembangunan sosial di Indonesia adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

Tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu menembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Rumusan tersebut menggambarkan kondisi kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan dimana tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang baik dan bukan hanya sekedar kemakmuran material, tapi juga pada aspek sosial dan spiritual. Midgley (1995) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan. Sebagai sebuah proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu kebutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Penjelasan Midgley tersebut menggambarkan bahwa masyarakat telah berada dalam kondisi sejahtera jika terpenuhi tiga unsur yaitu masalah sosialnya dapat dikelola, kebutuhannya terpenuhi dan masyarakatnya memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri.

Permasalahan pembangunan di Indonesia pada dimensi makro terlihat dengan adanya kesenjangan pembangunan desa dan kota. Kondisi ini mendorong adanya migrasi dari desa ke kota yang sangat *massive*, yang menyebabkan modal manusia (*human capital*) yang berpotensi untuk mengembangkan daerah pedesaan justru mengalir ke kota-kota besar. Sementara di sisi lain, berkembangnya teknologi industri 4.0, menuntut sumberdaya manusia untuk lebih adaptif terhadap perubahan. Sumberdaya manusia yang dibutuhkan saat ini adalah yang memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi digital. Rohida (2018) dalam artikelnya menyebutkan era industri 4.0 ini juga mendisrupsi berbagai aktivitas manusia. Sumber daya

manusia menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam sebuah organisasi (Rohida, 2018). Apalagi menghadapi bonus demografi, permasalahan sumberdaya manusia harus mampu menjawab tantangan global sehingga memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Modal manusia (*human capital*) yang datang ke kota besar yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan lapangan kerja di sektor formal malah menyebabkan banyaknya pengangguran karena ketidakmampuannya bersaing. Dampak buruk yang terjadi adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di perkotaan yang akhirnya memunculkan dinamika sendiri dalam kelompok-kelompok masyarakat.

Pada Februari 2019, Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,01 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak diserap oleh pasar kerja. Jika dilihat dari jenjang pendidikan, tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi adalah dari lulusan SMK yang mana berada di rentang usia produktif. Pada bulan Februari 2019, TPT lulusan SMK menunjukkan angka sebesar 8,63 persen (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019). Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Data tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan yang ada didunia usaha dan dunia industri.

Mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa program pendidikan kecakapan hidup (*lifeskills education*). Istilah Pendidikan Kecakapan Hidup (*lifeskills*), diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (PLSP, 2003). Definisi lainnya tentang pendidikan kecakapan hidup dikemukakan oleh WHO sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif. Dengan demikian konsep dan karakteristik program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), seharusnya mampu menjadi kebijakan yang menjadi jembatan penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Dalam rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2015 – 2019,

Program Pendidikan Kecakapan Hidup (*life skills*) berbasis pelatihan keterampilan (*vocational skill*) menjadi salah satu program kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi kondisi tersebut di atas. Program pelatihan keterampilan diarahkan untuk mampu meningkatkan kompetensi individu dalam masyarakat agar lebih kompetitif di era MEA. Program yang dilaksanakan berupa Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan maupun satuan pendidikan non formal lainnya. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah program pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat yang kemudian dapat menjadi bekal untuk mampu bersaing di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Sementara Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah program pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi berwirausaha masyarakat. Program ini berskala nasional yaitu memiliki cakupan di seluruh wilayah Indonesia. Kedua program tersebut sama-sama memiliki target warganegara Indonesia usia produktif, yang putus sekolah, menganggur dan atau lulus tapi tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya program ini diharapkan mampu menyiapkan kebutuhan SDM yang berkualitas yang mampu terserap pasar kerja di dunia usaha dan dunia industri, dan juga daya saing baik di pasar lokal maupun internasional.

Untuk mendapatkan gambaran program sebagai strategi intervensi dalam penyiapan SDM yang berdaya saing global dalam perspektif pembangunan sosial, maka perlu dilakukan sebuah studi untuk menganalisis konsep program pendidikan kecakapan hidup tersebut di atas.

KAJIAN LITERATUR

Program Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

Menurut Brolin (1989), *Life Skills is constitute a continuum of knowledge and aptitude that are necessary for a person to a function effectively and avoid interruptions of employment experience.* Dalam definisi ini Brolin menjelaskan bahwa kecakapan hidup adalah sebuah rangkaian pengetahuan dan keterampilan yang penting bagi seseorang untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan menghindari gangguan pengalaman kerja. Dirjen PLSP (2003) mendefinisikan *Life Skills* sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu

mengatasinya. Dari definisi tersebut tergambar program ini merupakan program yang memiliki fokus pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian seseorang dalam kehidupannya. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Sutisna (2010), yang menjelaskan bahwa pendidikan kecakapan hidup memiliki spektrum yang sangat luas subjek dan objeknya, untuk itu pembatasan kelompok sasaran peserta program untuk masyarakat miskin, tidak sekolah dan masyarakat marginal lainnya untuk memfokuskan output nya, yaitu memberikan keterampilan kerja, mendorong peserta berusaha mandiri, dimana tujuan akhir dari keduanya adalah peningkatan pendapatan, kesejahteraan dan produktivitas.

Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) mencakup: Kecakapan Mengenal Diri (*Self Awareness/ personal skill*) kecakapan ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk mengenali dirinya, mengenali potensinya secara menyeluruh, Kecakapan berpikir rasional (*rational skill*) adalah kecakapan terkait dengan kemampuan akademik , Kecakapan sosial (*social skill*) yaitu kecakapan terkait dengan kemampuannya bersosialisasi dengan lingkungannya, Kecakapan vokasional (*vocational skill*) yaitu kecakapan terkait penguasaan terhadap keterampilan untuk satu jenis pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik atau biasa disebut juga dengan keterampilan teknikal (*technical skills*).

Tujuan pendidikan kecakapan hidup dalam pedoman pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) yang dikeluarkan oleh Direktorat Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen PLS, 2003) adalah sebagai berikut: Pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap warga belajar di bidang pekerjaan/usaha tertentu sesuai dengan bakat, minat perkembangan fisik dan jiwanya serta potensi lingkungannya, sehingga mereka memiliki bekal kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri yang dapat dijadikan bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Strategi Intervensi dalam Perspektif Pembangunan Sosial

Midgley (1995) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Secara eksplisit Midgley (1995) menjelaskan pendekatan pembangunan berupaya mengintegrasikan

proses pembangunan ekonomi dan sosial, seperti dua sisi mata koin yang saling melengkapi satu sama lain. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan.

Dalam kaitan dengan strategi pembangunan sosial Midgley (1995) mengemukakan terdapat tiga strategi besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu: Pembangunan sosial melalui individu (*Social Development by Individuals*), yaitu individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pembangunan Sosial melalui Komunitas (*Social Development by Communities*), di mana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pembangunan Sosial melalui Pemerintah (*Social Developments by Government*). Cox (2001), menyebutkan bahwa ketiga strategi tersebut dalam tiga level pembangunan, yakni pembangunan di level makro, yang pada dasarnya merupakan pembangunan di level normatif, dimana intervensi dilakukan oleh para praktisi kesejahteraan sosial dalam pembuatan berbagai kebijakan sosial, kedua pembangunan di level mezzo yaitu pembangunan dilakukan oleh para pelaku perubahan dengan mengembangkan program yang bersifat preventif proaktif dan kreatif bersama masyarakat melalui pengembangan masyarakat (*Community Development*), pada level ini pembangunan dilakukan di tingkat organisasional ataupun komunitas, ketiga pembangunan di tingkat mikro lebih bersifat rehabilitatif dan remedial terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan segera (Adi, 2013).

Diperlukan strategi intervensi untuk mengatasi permasalahan yang ada di masing-masing level. Dimensi makro pada dasarnya adalah dimensi yang memfokuskan pada intervensi sosial di level kebijakan, sehingga model yang tepat menurut Jack Rothman adalah model intervensi kebijakan sosial dan perencanaan sosial (Rothman, 1995). Gray (1997) menjelaskan pembangunan sosial di level makro (*national level*), menitik beratkan pada pembuatan kebijakan sosial, penyediaan bantuan sosial di tingkat nasional dan juga pemberdayaan politik bagi warga negara (Adi, 2003). Dalam pandangan para ahli, strategi intervensi makro merupakan pembangunan pada level normatif, dimana agen perubahan berusaha melibatkan diri pada upaya perencanaan dan pembuatan kebijakan sosial.

Midgley, 1995, membagi kebijakan sosial ke dalam dua aspek yakni pertama kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah, yang didesain untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan harkat martabat manusia. Kedua kebijakan dipahami sebagai kegiatan akademik yang mencakup deskripsi, eksplanasi dan evaluasi terhadap kebijakan sosial. Pendapat Midgley tersebut, memandang kebijakan sosial terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Zastrow (2010) yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, kesehatan dan rekreasional pada setiap individu di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan sosial perlu diarahkan untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut (Zastrow, 2010).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas, studi ini merupakan sebuah studi kepustakaan sebagai langkah awal mengidentifikasi masalah dengan menelusuri data statistik yang dimiliki suatu instansi, departemen ataupun sumber lainnya. Selain itu studi kepustakaan dapat digunakan untuk melihat kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu dengan menelusuri data statistik yang dimiliki kementerian pendidikan dan kebudayaan dan data dari Badan Pusat Statistik sebagai data sekunder yang digabungkan dengan data kualitatif pengimplementasian program.

Teknik analisis data yang dilakukan adalah deskriptif analitis dimana data yang diperoleh dari hasil penelusuran data sekunder dan data implementasi lapangan dijabarkan untuk kemudian dipelajari dan dibuat kesimpulan. Menurut Neumann (2014) secara umum analisis data berarti mencari pola perilaku, objek atau batang tubuh ilmu. Bila satu pola telah dapat diidentifikasi, maka selanjutnya diberi interpretasi berdasarkan teori sosial atau teori yang sesuai dengan tempat penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Sebagai Strategi Intervensi Makro dalam Pembangunan Sosial di Indonesia

Dalam implementasi perencanaan program, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai salah satu unit kerja di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan telah melakukan evaluasi program yang melibatkan para akademisi terhadap program-program yang dilaksanakan. Tingginya angka pengangguran di usia produktif dan besarnya kebutuhan tenaga kerja atau SDM yang berkualitas serta rendahnya kemampuan ekonomi masyarakatnya

mengarahkan kebijakan pemerintah kepada perlu adanya pemberian bantuan untuk pengembangan potensi dan kompetensi masyarakat tersebut. Di samping itu sejalan dengan RPJMN 2015 – 2019 yang mengarahkan kebijakan kepada pemerataan akses pendidikan maka muncul program pemberian bantuan beasiswa untuk mengikuti kursus dan pelatihan bagi masyarakat usia produktif. Dari tahun ke tahun dilaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan program setiap tahunnya dengan mengeliminir kemungkinan-kemungkinan hambatan yang dapat terjadi di sepanjang proses implementasinya.

Pada masa sekarang ini, kementerian pendidikan melaksanakan program pendidikan kecakapan hidup yang bertujuan mengembangkan kecakapan vokasional (*vocational skill*) bagi masyarakat Indonesia usia produktif. Tujuannya adalah membekali sumberdaya manusia agar pada saat tiba terjadinya bonus demografi, maka akan mampu mendorong kondisi perekonomian di Indonesia. Di samping itu, untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas SDM disebabkan rendahnya kompetensi di satu jenis bidang tertentu. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) mulai dilaksanakan di tahun 2015 oleh pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) berupaya untuk membekali peserta program untuk mampu menguasai satu jenis keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) berupaya untuk membekali peserta program dengan satu jenis keterampilan tertentu dengan penekanan pada kemandirian dan pengembangan motivasi berwirausaha. Program ini merupakan program pemberian dana bantuan beasiswa untuk mengikuti kursus dan pelatihan keterampilan yang berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri. Keduanya berupaya untuk memberikan perluasan akses bagi masyarakat di seluruh Indonesia yang berada di rentang usia produktif yang belum memiliki pekerjaan tetap, putus sekolah, atau lulus sekolah tapi tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) diselenggarakan dengan pendekatan 4 in 1, yakni: Analisis kebutuhan pelatihan (*training need assesment*) berbasis pada *job order* yang dibuktikan dengan adanya surat permintaan tenaga kerja dari DUDI, Pelatihan berbasis kompetensi (*Competence Based Training*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) maupun satuan

pendidikan non formal lainnya, Sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan dengan mekanisme uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi kompetensi, Jaminan penempatan kerja sesuai dengan surat permintaan tenaga kerja. Berdasarkan hasil evaluasi program tahun 2018 atas keberhasilan program, diperoleh data sebanyak 80,2 persen peserta program PKK ini dinyatakan lulus uji kompetensi (Evaluasi Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Tahun 2018).

Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) diselenggarakan dengan pendekatan 4 in 1, yakni: Identifikasi peluang usaha dan potensi peserta didik, Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP) maupun satuan pendidikan non formal lainnya, Evaluasi hasil pelatihan, Pendampingan rintisan usaha. Program PKW lebih banyak menekankan pada peningkatan kemampuan kewirausahaan dengan pemberian materi mengidentifikasi peluang usaha, membangun pola pikir dan mental wirausaha, pemasaran dan pengembangan usaha, pengelolaan produksi, keuangan dan SDM. Dalam proses pembelajarannya, program PKW mengadopsi prinsip pendidikan kecakapan hidup secara utuh, yakni mengembangkan keterampilan personal (*personnal skill*) yakni melalui pengenalan potensi diri dan pengembangan mental wirausaha, kedua kecakapan berpikir rasional (*rational skill*) yaitu dengan pengembangan kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pasar dan menghitung kebutuhan produksi, ketiga kemampuan sosial (*social skill*) yakni dengan pengembangan kemampuan pemasaran (*marketing*) dan terakhir pengembangan kemampuan vokasional (*vocational skill*) yakni terkait keterampilan menghasilkan produknya. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2018 atas keberhasilan program, diperoleh data sebanyak 76,8 persen peserta program berhasil melanjutkan rintisan usahanya setelah mengikuti pelatihan (Evaluasi Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Tahun 2018).

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 5 (lima) jenis keterampilan yang menjadi favorit peserta program untuk diikuti program pelatihannya. Kelima jenis keterampilan tersebut yaitu Otomotif dan layanan jasa, Komputer dan desain grafis, Menjahit, Tata Rias, Seni dan Kerajinan. Jika dilihat dari jenis keterampilan favorit tersebut, tampak minat pengembangan kompetensi peserta mengarah pada industri yang memiliki daya jual yang baik di pasar. Industri otomotif dan layanan saja menempati kedudukan tertinggi terkait dengan banyaknya pengguna otomotif seperti mobil dan sepeda motor baik di kota besar maupun di pedesaan. Tingginya minat di bidang otomotif secara tidak langsung

menunjukkan adanya permintaan pasar yang tinggi akan SDM yang menguasai kompetensi di bidang otomotif tersebut. Selain itu bidang komputer dan desain grafis menempati urutan kedua, hal tersebut terkait dengan berkembangnya era industri 4.0 yang mengarahkan seluruh kegiatan industri kepada penggunaan internet sebagai *internet of things (IoT)*. Pemanfaatan jalur digital hampir di setiap kehidupan masyarakat, menuntut semua orang untuk mampu menggunakan akses jaringan internet, baik untuk keperluan bekerja di perusahaan maupun keperluan berwirausaha. Selanjutnya adalah jenis keterampilan menjahit, tata rias, serta seni dan kerajinan. Ketiga jenis keterampilan ini mengarahkan pada adanya kebutuhan di dunia industri kreatif yang saat ini sedang berkembang. Tingginya minat terhadap dunia fashion, seni dan kerajinan menuntut adanya pemenuhan kebutuhan SDM yang menguasai ketiga bidang ini.

Intervensi yang dilakukan dalam kaitan dengan pembangunan sosial seperti program PKK dan PKW di atas, merupakan program intervensi yang mengarahkan adanya perubahan pada aspek pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*belief*), dan sikap (*attitude*), serta niat (*intention*) individu. Skema 4 in 1 yang diterapkan dalam implementasi program PKK dan PKW menganut keempat aspek tersebut disebabkan program tersebut merupakan sebuah program pelatihan keterampilan yang hasil akhirnya adalah kompetensi baik bekerja sesuai standar pada DUDI maupun berwirausaha yang juga mencakup keempat hal tersebut. Urutan perubahan pada aspek pengetahuan hingga niat seseorang untuk mengubah kehidupannya merupakan sebuah proses penyadaran terhadap kelompok sasaran dalam kerangka pembangunan sosial. Perubahan perilaku yang diharapkan dari hasil mengikuti pelatihan ini adalah adanya etos kerja yang tinggi dan mental wirausaha yang baik. Pelatihan program PKK dan PKW tidak hanya diberikan materi berupa teori saja tetapi juga banyak praktek-praktek baik di tempat pelatihan maupun dalam dunia kerja/magang (*On the Job Training*).

Pembahasan

Program Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) berbasis vokasional berupa program PKK dan PKW yang dilaksanakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan berupa produk sosial dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang disusun melalui proses perencanaan dan dirancang bertujuan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Program ini telah mampu menggabungkan pembangunan sosial dengan pembangunan ekonomi dalam

pengimplementasiannya. Melalui pemberian beasiswa untuk mengikuti kursus dan pelatihan keterampilan, *output* yang diharapkan dari program ini adalah lulusan program yang berkualitas dan berdaya saing dan dapat diterima bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta mampu melahirkan wirausahawan – wirausahawan baru yang pada akhirnya mampu memberikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakatnya.

Produk sosial berupa program pemberian beasiswa untuk mengikuti pelatihan dirancang bertujuan untuk mengubah perilaku individu dan kelompok dalam suatu perubahan sosial maupun pembangunan sosial. Untuk mencapai hal itu diperlukan adanya produk sosial (*social product*) yang inovatif, oleh karena itu para praktisi di bidang ini dituntut untuk melakukan *assessment* terhadap kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan. Kotler (1981), menyebutkan ada tiga bentuk produk sosial yakni: (1) gagasan; (2) praktik dan (3) bentuk yang nyata. Meskipun demikian tidak semua produk sosial yang diluncurkan oleh agen perubahan memiliki bentuk yang nyata (*tangible products*) (Adi, 2003). Program PKK dan PKW ini dapat dikatakan sebagai sebuah produk sosial yang berupa gagasan, yaitu ide masyarakat sejahtera yang memiliki etos kerja, mental wirausaha yang baik serta kondisi perekonomian yang lebih baik setelah mengikuti kursus dan pelatihan keterampilan; praktik yaitu para penyelenggara program kursus seperti lembaga kursus dan pelatihan (LKP), PKBM, maupun satuan pendidikan nonformal lainnya serta para instruktur yang terlibat dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian sebagai sebuah produk sosial program ini tidak memiliki bentuk yang nyata (*tangible products*). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks pembangunan, perubahan dalam bentuk nyata bukanlah perubahan yang bisa terjadi dalam waktu yang cepat, akan tetapi memerlukan waktu yang lama dan mungkin baru bisa dirasakan setelah beberapa generasi.

Sebagai sebuah intervensi sosial di level makro, pemerintah menyusun perencanaan program secara normatif didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan di akhir periode program dan analisis kondisi masyarakat pada umumnya, untuk kemudian dijadikan masukan dan saran serta memperhatikan pertimbangan para praktisi, dan pakar melalui beberapa forum diskusi terpumpun (*Focus Group Discussion*). Kegiatan ini dilakukan untuk menetapkan tujuan-tujuan program dan juga target dan sasaran program. Dalam hal ini evaluator, para praktisi, para akademisi dan pakar merupakan agen-agen perubahan yang memiliki pengaruh dalam penyusunan kebijakan. Dengan hadirnya agen-agen perubahan ini program dapat lebih memperhatikan

unsur partisipasi publik, desentralistik dan demokratis.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka disarankan untuk diadakan penelitian lanjutan terkait pengimplementasian dan dampak pelaksanaan program terhadap peningkatan perekonomian peserta program dan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal maupun tempat usaha peserta program. Disamping itu perlu ada pendefinisian fungsi dan peran para agen perubahan dalam tatanan perencanaan program maupun pengimplementasian program. Perlu dijalin kerjasama yang lebih baik lagi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, Jakarta*. Rajawali Press.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019. In *Badan Pusat Statistik*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). RENSTRA KEMENDIKBUD 2015-2019. In *RENSTRA KEMENDIKBUD*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. Sage.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches: Pearson New International Edition*. Pearson Education Limited.
- PLSP, D. (2003). *Program Lifeskills Melalui Pendekatan Broad Based Education (BBE)*. Ditjen PLSP.

- Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*.
<https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i1.187>
- Pelatihan, D. P. K. dan (Ed.). (2018). *Evaluasi Capaian Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Tahun 2018*. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
- Pelatihan, D. P. K. dan (Ed.). (2018). *Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pelatihan, D. P. K. dan (Ed.). (2018). *Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rothman, J. (1995). *Strategies of community intervention: Macro practice*. FE Peacock Publishers, Inc.
- Sutisna, N. (2010). Pemberdayaan Penca Pasca Sekolah Melalui Kecakapan Hidup. *JASSI ANAKKU, Volume 2 Nomor 9 Tahun 2010*.